

**PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN ANTARA PENJUAL
DAN PEMBELI DALAM JUAL BELI *ONLINE***



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

TRI AJI IRAWAN
C100150215

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN ANTARA PENJUAL DAN
PEMBELI DALAM JUAL BELI *ONLINE***

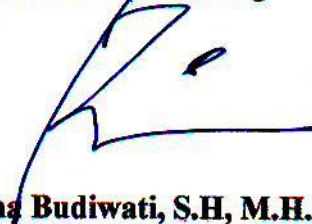
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

TRI AJI IRAWAN
C100150215

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written over a horizontal line.

(Septarina Budiwati, S.H, M.H., C.N.)

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM JUAL BELI *ONLINE*

Oleh:

TRI AJI IRAWAN
C100150215

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 19 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khadzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK. 537

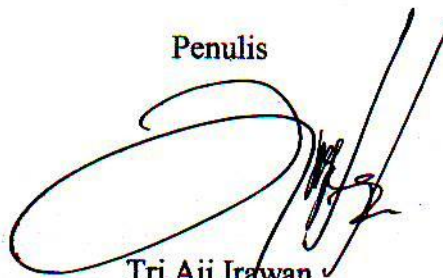
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Januari 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and some smaller, less distinct marks.

Tri Aji Irawan
C100150215

KEPERCAYAAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM JUAL BELI *ONLINE*

Abstrak

Perkembangan teknologi memang telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet. Perjanjian jual beli *online* salah satu dari bentuk berkembangnya teknologi, dimana kita tidak perlu lagi bertatap muka untuk sekedar melakukan transaksi jual beli melainkan kita dapat melakukan transaksi tersebut dirumah kita masing-masing untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Dalam perjanjian jual beli secara *online* mengandung konstruksi hukum dimana para pembuat perjanjian jual beli secara *online* tersebut telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat melakukan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli secara *online* tersebut juga sangat memerlukan suatu kepercayaan antara penjual dan pembeli yang timbul melalui interaksi secara *online* melalui aplikasi chat ataupun aplikasi jual beli secara langsung. Dalam perjanjian jual beli secara *online* ini juga tidak lepas dari problematika yang sering terjadi dalam proses jual beli, namun dikarenakan proses ini dilakukan secara *online* maka problematika yang timbulpun sedikit berbeda, antara lain problematika keterlambatan pengiriman, kesalahan dalam pencantuman kode barang sehingga terjadi kekeliruan dalam pengiriman, kesalahan dalam ukuran yang dipesan dengan apa yang dikirimkan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: perjanjian, jual beli, asas kepercayaan

Abstract

Technological developments have indeed had a positive impact on the development of business law, especially since the development of the internet. An online sale and purchase agreement is one of the forms of developing technology, where we no longer need to meet face-to-face to just make a sale and purchase transaction, but we can do the transaction in each of our homes to make buying and selling transactions online. In an online sale and purchase agreement it contains a legal construction whereby the makers of the online sale and purchase agreement have fulfilled the elements to be able to enter into a sale and purchase agreement. The online sale and purchase agreement also really requires a trust between the seller and the buyer that arises through online interaction through the chat application or direct sale and purchase application. In this online sale and purchase agreement, it also cannot be separated from the problems that often occur in the process of buying and selling, but because this process is carried out online, the problems that arise are slightly different, including the problem of late delivery, errors in the listing of goods so that shipping errors occur. , errors in size ordered with what was sent and so forth.

Keywords: agreement, sale and purchase, principle of trust

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang telah terjadi didunia ini memang sangatlah pesat, hal ini melahirkan banyak penemuan-penemuan baru yang berguna sekali untuk membantu dan mempermudah melakukan berbagai hal, antara lain penemuan di bidang teknologi internet yang mana perkembangannya bisa dikatakan paling pesat. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an akses internet masihlah sangat terbatas pada kalangan-kalangan tertentu saja seperti kalangan militer dan pemerintah saja yang dapat menggunakan akses internet tersebut namun pada tahun sekarang ini akses internet sudah sangat luas dengan pengguna yang tidak terbatas oleh kalangan-kalangan apapun, dimana seluruh elemen masyarakat dapat menikmati dan mengakses internet dari segala penjuru dunia.

Perkembangan teknologi memang telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet (interconnection networking), yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, karena kontribusinya terhadap efisiensi, cepat, mudah dan praktis. Internet yang merupakan implementasi dari *transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional, dan internasional tanpa batasan geografis antar negara, termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam perjanjian elektronik. Perlahan namun pasti, usaha dengan pemanfaatan teknologi internet ini dilakukan dengan membuka suatu ladang untuk melakukan usaha berbisnis.

Proses transaksi yang dilakukan didunia bisnis tanpa adanya pertemuan antara para pihak yang menggunakan media internet termasuk kedalam transaksi elektronik. Transaksi didunia bisnis terdapat berbagai macam bentuk, diantaranya adalah *e-commerce* atau sering disebut perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan menggunakan media internet sebagai medianya secara elektronik. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai cara berbelanja atau berdagang secara *online* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan jual beli secara *online* tersebut. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi khususnya perdagangan.

Dengan adanya layanan jasa berupa *e-commerce* yang dapat secara cepat dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindak lanjuti dengan secepat mungkin, sehingga perusahaan tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat bagi pelanggan. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *e-commerce* untuk memasarkan berbagai produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Selanjutnya penting dipahami bahwa kontrak elektronik adalah kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*), yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya, namun pembuatannya yang melalui system elektronik atau menggunakan media elektronik. Karenanya maka seluruh perbuatan perjanjian jual beli *online* harus patuh pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (*Lex specialis*) dan juga pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Murah, praktis, dan efisien merupakan semboyan internet. Tapi sering dilupakan, sebagai media promosi internet tak luput dari berbagai sengketa yang terjadi. Para pelaku bisnis sering menyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya mengalami sengketa. Padahal, persoalan hukum tersebut timbul karena ketidak hati-hatian pelaku bisnis itu sendiri ketika menyetujui kontrak tersebut. Biasanya, kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak mengalami sengketa. Padahal, pemahaman isi kontrak pada saat kontrak tersebut dirancang dan disetujui merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang telah disepakati tersebut mengalami sengketa. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Sengketa tidak akan terjadi jika para pihak taat pada asas yang ada. Asas sendiri adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang kongkrit bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan. Ada banyak asas dalam perjanjian hukum, antara lain Asas Kepercayaan, Asas

Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Itikad Baik, Asas Kekuatan Mengikat Kontrak dan lain-lain.

Asas kepercayaan sendiri sangat penting dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan diantara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Yang berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Kepercayaan sebagaimana dimaknai seperti diatas, dipahami sebagai faktor yang menentukan kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*? (2) Bagaimana penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli *online* ? dan (3) Problematika apa yang muncul dalam jual beli secara *online*?

Adapun tujuan dan manfaat penelitian antara lain: (1) Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut: (a) Mendeskripsikan bagaimana konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*, (b) Mendeskripsikan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli *online*, (c) Mengetahui problematika apa saja yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*; (2) Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Manfaat Teoritis yaitu memberikan pengetahuan dalam berfikir khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*, penerapan asas kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online* dan problematika yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*, (b) Manfaat Praktis yaitu dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan tentunya juga bagi para pihak yang terkait, dikarenakan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam berfikir serta wawasan pemahaman mengenai konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*, penerapan asas kepercayaan antara

penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli *online* dan mengetahui problematika yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*.

2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan perjanjian jual beli *online* dan penerapan asas kepercayaan menggunakan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan untuk mendapatkan data mengenai kepercayaan itu sendiri dapat diperoleh melalui studi lapangan langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Perjanjian jual beli adalah perjanjian sebagaimana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut dengan harga. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dalam perjanjian jual beli ini juga memiliki subjek jual beli, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang sendiri menurut konsep hukum sendiri terdiri atas manusia dan badan hukum.

Hasil wawancara diketahui bahwa terdapat subjek hukum juga dalam transaksi jual beli *online*, yaitu subjek hukum sebagai penjual dan pembeli dalam jual beli *online*. Setelah subjek hukum, yang selanjutnya adalah objek jual beli, dimana objek hukum ini merupakan suatu prestasi, yaitu suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi

Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli merupakan unsure yang penting dalam perjanjian jual beli, selain harga,. Apabila barang yang dijual belikan itu tidak ada, tentunya juga tidak ada perjanjian jual beli. Jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat perjanjian, yang ketiga adalah untuk sahnya perjanjian harus ada suatu hal tertentu, maka barang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah harus bisa ditentukan setidaknya dapat ditentukan yang menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 1332 KUHPerdara, maka hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek pokok persetujuan.

Dalam transaksi jual beli *online* diketahui bahwa terdapat benda yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli secara *online* tersebut, dalam hasil wawancara dari pemilik toko *online* Mahira Hijab dan Maliqa Hijab diketahui bahwa objek perjanjian jual beli *online* adalah barang-barang yang dijual, seperti gamis syari, jilbab, baju koko dan pakaian muslim dan muslimah lainnya yang dijual.

Dalam melakukan perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian pula, syarat sah menurut pasal 1320 KUHPer adalah:

3.1.1 Sepakat Mereka yang Mengikat Dirinya

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan dan atau penipuan.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online* telah sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut dibuktikan dengan pihak pembeli melakukan penawaran terhadap barang-barang dengan cara menghubungi pihak penjual melalui chat Whatsapp ataupun Line untuk menanyakan barang yang ingin dibelinya apakah tersedia atau tidak, jika sudah dikonfirmasi bahwa barang yang ingin dibeli masih ada maka akan terjadi akad perjanjian jual beli *online* yaitu pihak pembeli memesan barang yang ingin dibelinya dan pihak penjual mengkonfirmasinya. Setelah akad tersebut dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak maka pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang seharga barang tersebut dan pihak pembeli akan mengirimkan barang tersebut setelah diterimanya transfer uang dari pembeli.

3.1.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata yaitu: Orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampunan, orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online*, proses pembayarannya melalui transfer ATM. Jadi jika seseorang memiliki rekening disebuah bank, dapat diketahui bahwa seseorang dapat memiliki kartu ATM apabila telah memiliki KTP dan telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dapat dipahami yang melakukan adalah orang yang telah dianggap dewasa dan telah cakap hukum.

3.1.3 Suatu hal tertentu

Mengenai hal tertentu ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPdata. Pasal 1332 KUHPdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Sedangkan Pasal 1333 KUPdata menentukan “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online* khususnya Indah Permatasari dan Fertina Subianingsih selaku penjual dalam penjualannya menjual dengan jelas busana – busana muslim dan muslimah sehingga dapat diketahui dengan jelas dalam perjanjian jual beli ini pastilah mengandung suatu objek jual beli yang jelas.

3.1.4 Suatu sebab yang diperkenankan

Maksudnya ialah isi perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPdata). Selain itu pasal 1335 KUHPdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang

dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online* khususnya Indah Permatasari dan Fertina Subianingsih selaku penjual dalam penjualannya menjual dengan jelas busana – busana muslim dan muslimah sehingga dapat diketahui dengan jelas dalam perjanjian jual beli ini pastilah mengandung suatu sebab yang diperkenankan.

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lainnya, diantaranya adalah: Sesuai dengan Bab II Pasal 9 UU ITE pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Sesuai dengan hasil wawancara, pelaku usaha sudah menerapkan hal tersebut yaitu menyediakan informasi yang lengkap mengenai barang yang dijualnya. Dalam Pasal 20 ayat 1 UU ITE menyebutkan kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

Sesuai dengan hasil wawancara, proses jual beli *online* terjadi saat penawaran pertama oleh pembeli, lanjut dengan proses transfer uang kepada penjual hingga pembeli menerima barang yang telah dibelinya. Dalam Konstruksi Hukum Jual Beli *Online* ini juga pastilah mengandung kewajiban dan haknya dari masing-masing pihak penjual maupun pembeli maka dapat diketahui seperti berikut: (1) Hak penjual. Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online* dalam hal ini adalah penjual dalam pelaksanaannya memiliki haknya adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dari barang yang ia jual. Menurut Pasal 1513 KUHPer menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar sejumlah uang seharga pembelian pada waktu yang telah disepakati, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya; (2) Kewajiban Penjual. Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online* dalam hal ini adalah penjual dalam pelaksanaannya memiliki kewajibannya sebagai penjual yaitu untuk menyerahkan

barang yang disepakati dalam perjanjian jual beli *online* tersebut. Dalam hal ini penjual berkewajiban untuk mengirimkan barang yang telah dibayarkan oleh konsumen tersebut ke rumah atau tempat yang telah diberikan oleh konsumen; (3) Hak Pembeli. Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online* dalam hal ini adalah pembeli yaitu memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibayarnya kepada penjual, yang mana penjual mengirimkan barang tersebut ke rumah atau tempat yang telah diberikan oleh konsumen; dan (4) Kewajiban Pembeli. Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang melakukan perjanjian jual beli *online* dalam hal ini adalah pembeli yaitu memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang seharga barang yang hendak dibelinya sesuai dengan harga yang telah dicantumkan oleh penjual ataupun seharga barang yang telah disepakati kedua belah pihak.

3.2 Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Jual Beli Online.

Berdasarkan pasal 1338 (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan dasar kepercayaan. Asas Kepercayaan ini dapat dibedakan atas kepercayaan yang subyektif dan kepercayaan yang obyektif. Kepercayaan dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Kepercayaan dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma keputusan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada sangat banyak sekali faktor untuk membuat pembeli *online* dan penjual *online* untuk mendapatkan kepercayaan antara mereka, seperti unsure subyektif yang dijelaskan diatas bahwa pembeli maupun penjual akan mendapatkan kepercayaan mereka salah satunya melalui chat antara penjual dan pembeli, pada saat melakukan chat apakah

pembeli merasa nyaman dengan penjual toko tersebut atau tidak. Setelah mendapatkan unsure subjektif tersebut adapula unsure objektif yang mana setelah para penjual dan pembeli melakukan perjanjian jual beli *online* dan telah sepakat melakukan transaksi maka transaksi tersebut akan mengikat kepada para pihak seperti telah diatur dalam 1338 KUHP.

Kepercayaan seseorang akan selalu dibangkitkan oleh orang-orang lain seperti terjalin dalam komunikasi antara penjual dan pembeli. Dari perilaku tertentu, yang dilekatkan pada tuntutan pergaulan masyarakat dan kepercayaan yang dibangkitkan pada pihak lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa para pihak karena kepercayaan yang dibangkitkan, berkehendak untuk terikat pada perjanjian jual beli *online* tersebut. Kepercayaan yang setiap kali harus ditumbuhkan keberadaannya antara penjual dan pembeli. Kepercayaan baru dapat dibenarkan apabila situasi dan kondisi objektif mampu mendukung dan sebagai landasan pembenaran tersebut. Kepercayaan subjektif sendiri harus diujikan terhadap situasi dan kondisi objektif kasus yang bersangkutan harus ditetapkan akan bergantung pada seberapa sering dan tingkat keberaturan kita mengalami rasa percaya tersebut. Dengan demikian, maka perilaku factual yang berulang-ulang dapat memunculkan kepercayaan factual yang pada gilirannya dapat memunculkan suatu norma

Asas lain yang hampir sama adalah asas kejujuran. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak itu sendiri dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Dijelaskan dalam QS, Al-Azhab (33): 70 disebutkan yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*". Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang sedang melakukan perjanjian, bagi masyarakat dan bagi lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat atau kerugian itu dilarang.

Pada hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa penjual selalu mencantumkan segala hal yang dijualnya secara jujur tanpa menutupi sesuatu apapun, pelaku usaha selalu mencantumkan harga, spesifikasi barang yang dijualnya secara komplit dan detail, pelaku usaha tidak pernah melakukan kebohongan terhadap barang yang dijualnya dikarenakan selalu berfikir untuk selalu menjadi toko yang jujur dan dapat dipercaya oleh para konsumen sehingga lambat laun dengan sendirinya para konsumen akan mendapatkan kepercayaan

dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan transaksi jual beli *online* pada toko *online* tersebut. Perjanjian jual beli *online* yang dilakukan juga memiliki manfaat kepada seluruh muslim dan muslimah yang membeli barang di toko milik Narasumber pertama Indah Permatasari dan Narasumber yang kedua Fertina Subianingsih dikarenakan focus pada toko tersebut adalah pakaian-pakaian yang dianjurkan secara agama Islam sehingga selalu bermanfaat untuk digunakan pada saat kapanpun dan tidak menyalahi aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pada dasarnya proses kepercayaan antara pembeli dan penjual tidaklah langsung didapatkan begitu saja, seperti yang diungkapkan oleh Narasumber, untuk dapat memberikan kepercayaan kepada penjual ataupun pembeli akan dilakukan berbagai macam hal antara lain

Konsumen akan mencari tahu mengenai terpercaya atau tidaknya suatu toko *online* tersebut. Konsumen biasanya tidak langsung percaya begitu saja dengan suatu toko *online*, konsumen sebelum melakukan penawaran akan mencari tahu tingkat baik buruknya suatu toko *online* tersebut dengan cara melihat terlebih dahulu mengenai jumlah pengikut yang mengikuti toko *online* tersebut, setelah mengetahui jumlah pengikut selanjutnya konsumen akan mencari tahu apakah pengikut tersebut merupakan pengikut asli toko tersebut atau hanya sebuah akun kosong yang sengaja diikutkan pada toko *online* tersebut agar terlihat banyak pengikut dan dapat dipercaya, konsumen melihat secara acak pengikut tersebut, jika sudah dinilai bahwa pengikut tersebut itu asli maka konsumen akan mencari tahu mengenai tanggapan balik para pembeli yang sudah pernah membeli pada toko *online* tersebut dengan cara melihat kolom komentar pada laman toko *online* tersebut. Biasanya akan terlihat manakah toko *online* yang sudah pasti dapat dipercaya dan mana yang masih belum banyak mendapatkan kepercayaan dari konsumen, sehingga para konsumen dapat yakin memilih suatu toko *online* yang dapat dipercaya. Biasanya toko *online* yang dapat dipercaya akan selalu mendapatkan komentar yang positif dari para konsumen terdahulu, seperti pengungkapan puas akan barang yang diterimanya, ucapan terima kasih kepada toko *online* tersebut dan penyampaian bahwa memang benar toko *online* tersebut bisa dipercaya oleh konsumen sehingga konsumen tidak perlu lagi jika ingin membeli suatu produk pada toko *online* tersebut. Setelah itu ada hal yang perlu diperhatikan kembali, seperti foto yang ditampilkan sebagai produk yang jualnya,

apakah foto tersebut merupakan foto asli dari toko tersebut atau hanya merupakan foto yang diambilnya dari internet dan dipasang sebagai iklan. Biasanya jika foto yang dipasang adalah asli maka toko tersebut dapat lebih mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Selain itu juga jumlah barang yang telah dijual oleh toko tersebut sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen, jika tingkat penjualan tinggi maka biasanya konsumen akan langsung percaya pada toko tersebut namun jika tingkat penjualan masih rendah atau bahkan kosong maka konsumen akan lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada toko tersebut. Dan yang terakhir adalah keberadaan toko tersebut diberbagai aplikasi jual beli *online* maupun website pribadi milik mereka, jika toko tersebut memiliki berbagai toko di berbagai aplikasi makan akan menumbuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang tinggi dikarenakan seriusnya dan terjualnya semua barangnya di aplikasi tersebut selain itu juga dapat mempermudah konsumen untuk memilih untuk melakukan transaksi jual beli *online* melalui aplikasi apa.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

3.3 Problematika Jual Beli secara *Online*

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual-beli *online* pasti ada kemungkinan salah satu pihak tidak melakukan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama. Apabila salah satu pihak atau semua pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka telah sepakati, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi suatu prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu: (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, (3) Melakukan apa yang

dijanjikan tetapi terlambat, dan (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa Narasumber diatas diketahui bahwa terdapat beberapa problematika yang timbul akibat adanya perjanjian jual beli *online* hingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Seseorang yang melakukan Wanprestasi adalah jika telah memenuhi satu atau seluruh syarat seorang melakukan wanprestasi:

3.3.1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Dalam hal ini menurut wawancara dengan para Narasumber diatas bahwa penjual bersama pembeli telah menyepakati barang yang diinginkan pembeli, dan oleh karena itu penjual akan mengirim barang yang telah disepakati dimana setelah pembeli mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati namun problematika yang sering dihadapi oleh Narasumber yang keempat yaitu Ndaru Diarma Putra terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* dimana setelah pembeli mentransfer uangnya, barang yang diperjanjikan tidak pernah sampai ketangan pembeli dan juga problematika yang sering dihadapi oleh Narasumber yang kelima yaitu Bahen terjadi wanprestasi dimana setelah pembeli mentransfer uangnya, barang yang diperjanjikan malah sudah habis dan tidak bisa mengirim kepada pembeli. Dalam problematika yang sering dihadapi oleh para Narasumber tersebut bahwa kasus ini memenuhi unsur pertama yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya karena penjual sama sekali tidak melakukan pengiriman barang apapun dan juga penjual sama sekali tidak melakukan pengiriman barang dikarenakan habisnya barang yang menjadi objek perjanjian.

3.3.2 Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan

Dalam hal ini menurut wawancara dengan para Narasumber diatas bahwa dalam perjanjian yang telah diselenggarakan setelah pembeli memesan barang yang dijual, pembeli lalu mengkonfirmasi penjual, maka setelah itu adalah pembeli mentransfer sejumlah uang seharga yang telah disepakati bersama, setelah itu penjual mengirim barang kepada pembeli, dan barangpun telah diterima oleh pembeli meskipun problematika yang sering dihadapi oleh Narasumber yang kedua yaitu Fertina Subianingsih terjadi kekeliruan dalam pengiriman barang namun penyelesaiannya tetap dilakukan penggantian barang sesuai dengan apa

yang telah diperjanjikan dan juga problematika yang sering dihadapi oleh Narasumber yang ketiga yaitu Guntur Bayu terjadi kesalahan dalam pengiriman barang yang seharusnya berukuran L namun yang dikirim adalah berukuran M. Dalam problematika yang sering dihadapi oleh para Narasumber tersebut bahwa dapat diartikan memenuhi unsure kedua wanprestasi yakni melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.

3.3.3 Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

Dalam hal ini menurut wawancara dengan Narasumber yang pertama yaitu Indah Permatasari adalah bahwa dalam perjanjian yang telah diselenggarakan tetap menunaikan semua kewajiban yang telah disepakati namun terjadi keterlambatan beberapa hari, biasanya satu sampai tiga hari dalam sampainya barang objek perjanjian kealamat pembeli. Meskipun terjadi keterlambatan sampainya barang kealamat pembeli, namun hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai wanprestasi dikarenakan belum atau tidak terdesaknya barang yang dibeli untuk segera digunakan oleh pembeli.

3.3.4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dalam hal ini menurut wawancara dengan para Narasumber bahwa tidak dicantumkan suatu hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian tersebut, namun syarat wanprestasi tetaplah melekat pada perjanjian jual beli *online* tersebut. Sehingga syarat-syarat wanprestasi jika dilanggar salah satunya saja tetap melekat pada suatu perjanjian tersebut yang mengakibatkan tetap terjadinya wanprestasi

Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus diatas adalah yang pertama bahwa pihak pelaku mengakui bahwa kelalaian dilakukan oleh pelaku usaha meskipun terkadang juga pihak kurir yang lalai sehingga terjadi keterlambatan dalam peniriman barang dan pihak pembeli memaklumi atas kelalaian pihak pelaku usaha, dan meminta untuk menyelesaikan prestasi yang dianggapnya terlambat dan juga pihak penjual wajib mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh pembeli tersebut dan akhirnya pihak penjual telah mengembalikan uang yang telah ditransfer tersebut. Yang kedua penyelesaian yang dilakukan adalah bahwa pihak pelaku usaha mengakui bahwa terjadi kekeliruan dalam penamaan kode barang sehingga terjadi kekeliruan dalam pengiriman barang dan konsumenpun memakluminya lalu penjualpun mengganti rugi atas kesalahan pengiriman dengan cara menukar barang yang dibeli sesuai dengan yang diperjanjikan dan biaya

pengiriman ditanggung pelaku usaha. Yang ketiga Penyelesaian yang dilakukan adalah bahwa pihak pelaku usaha mengakui bahwa terjadi kekeliruan dalam pengiriman ukuran barang dan konsumenpun memaklumiya lalu penjualpun mengganti rugi atas kesalahan pengiriman dengan cara menukar barang yang dibeli sesuai dengan yang diperjanjikan dan biaya pengiriman ditanggung pembeli. Sedangkan yang keempat penyelesaian yang dapat dilakukan adalah meminta kepada pihak penyedia aplikasi dalam hal ini Lazada untuk membantu memproses wanprestasi yang dilakukan oleh toko *online* yang bersangkutan hingga selesai.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan beserta saran yang diharapkan dapat bermanfaat kepada para pihak-pihak yang terkait.

4.1.1 Bahwa konstruksi perjanjian melalui media elektronik atau biasa disebut dengan perjanjian *e-commerce* dapat disimpulkan mengakibatkan perjanjian yang dilakukan secara *online* oleh penjual dan pembeli merupakan perjanjian jual beli. Terdapat subjek hukum yaitu penjual dan pembeli yang terkait dengan perjanjian tersebut, objek hukum yaitu pakaian muslim dan muslimah yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut. Adanya harga yang dicantumkan oleh penjual untuk suatu produk yang ditawarkannya. Lalu adanya suatu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual melalui transfer ATM dan setelah pembayaran dilakukan penjual akan melakukan pengiriman barang tersebut kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

4.1.2 Bahwa penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli *online* menghasilkan data bahwa asas kepercayaan pada dasarnya proses kepercayaan antara pembeli dan penjual tidaklah langsung didapatkan begitu saja, kepercayaan seseorang akan selalu dibangkitkan oleh orang-orang lain seperti terjalin dalam komunikasi antara penjual dan pembeli. Dari perilaku tertentu, yang dilekatkan pada tuntutan pergaulan masyarakat dan kepercayaan yang dibangkitkan pada pihak lainnya, maka dapat

disimpulkan bahwa para pihak karena kepercayaan yang dibangkitkan, berkehendak untuk terikat pada perjanjian jual beli *online* tersebut.

- 4.1.3 Bahwa terdapat beberapa promblematika yang masih sering didapati oleh pelaku usaha maupun konsumen antara lain seperti keterlambatan barang sampai kealamat konsumen, kesalahan dalam pemesanan produk akibat dari kesalahan pemberian kode barang, kekeliruan dalam pemberian ukuran yang dipesan oleh konsumen, habisnya produk yang ditawarkan dengan cepat sehingga yang sudah mentransfer uangnya tapi kehabisan meminta untuk uangnya *direturn* dan sampai tidak dikirimkannya suatu barang yang telah dibayarkannya meskipun memang terjadi kesalahan dari pembeli sendiri yang menyetujui pernyataan barang telah sampai meskipun barang tersebut belum sampai.

4.2 Saran

- 4.2.1 Konstruksi hukum perjanjian jual beli *online* yang timbul akibat dari perjanjian jual beli secara *online* antara penjual dan pembeli sudah tersusun secara baik dari awalnya proses mencari tahu suatu produk hingga melakukan perjanjian jual beli secara *online* melalui proses chatting Whatsapp, Line maupun aplikasi jual beli *online* sehingga telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Untuk kedepannya alangkah baiknya untuk tetap dijaga proses tersebut dikarenakan proses tersebut sudah baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.2.2 Asas kepercayaan antara penjual dan beli sudah terjalin pada saat penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui proses chatting Whatsapp, Line dan aplikasi jual beli *online*. Proses tersebut sudah sangat baik dikarenakan pembeli menanyakan secara langsung kepada penjual mengenai keadaan benda yang ingin dibelinya dan penjual menjawabnya dengan baik sehingga terjadi kepercayaan melalui ikatan emosional antara penjual dan pembeli. Proses tersebut sudah sangat baik untuk menumbuhkan rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli sehingga alangkah baiknya untuk tetap dijaga proses tersebut.
- 4.2.3 Mengenai problematika yang sering terjadi dalam proses jual beli *online* seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, dikarenakan promblematia yang timbul biasanya hanya kesalahan kecil ataupun kelalaian dari para

pihak yang mana masih dapat untuk diperbaiki lagi. Terakait mengenai barang yang tidak sampai ketangan pembeli dikarenakan telah menyetujui pernyataan barang telah diterima dalam aplikasi jual beli sehingga proses permintaan ganti kerugian tidak dapat ditindak lanjuti. Lebih baiknya pada lain kesempatan pembeli lebih berhati-hati lagi untuk tidak sembarangan menyetujui pernyataan apapun dalam aplikasi tersebut sehingga proses jual beli *online* lebih aman dan dapat dimintai ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kartika, Elsi dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sjahputra, Imam, 2002, *Problematisa Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo.

Syaifudin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Maju.

Artikel:

Dewi Irmawati, 2013, *Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis*, <http://totslatos.blogspot.co.id> / 2013 / 10 / Pemanfaatan-ecommerce-dalam-dunia.html?m=1, diakses pada 6 September 2018, pukul 10:06 WIB.